

***EFFECT OF FISCAL DECENTRALIZATION ON ECONOMIC GROWTH OF
REGENCY/CITY IN EAST JAVA 2010-2014***

Syifa Habibah

syifabibah@gmail.com
Pendidikan Ekonomi

Dr. Haryo Kuncoro, SE, M.Si

har_kun@feunj.ac.id
Dosen Pembimbing 1

Dr. Karuniana Dianta A.S, S.IP, ME

dianta.sebayang@gmail.com
Dosen Pembimbing 2

ABSTRACT

This study aims to determine whether the Fiscal Decentralization that measured by revenue capacity and expenditure capacity have an impact on economic growth in East Java 2010-2014. The research method used in this study is shaped Time Series of the 2010-2014 and the cross section amounts to 12 regency and 4 city in East Java Province, with ex post facto method. The data presented annually obtained from BPS (Central Bureau of Statistics) of the Ministry of financial. This study uses panel data regression model Fixed effect. Based on the results of simultaneous analysis, revenue capacity and expenditure capacity significantly influence on economic growth of 16 regency/city in East Java. Based on the results of the analysis the revenue capacity giving impact significantly positive on economic growth of 16 regency/city in East Java. The expenditure capacity have negative impact and significant to economic growth of 16 regency/city in East Java.

Keywords: Revenue Capacity, Expenditure Capacity, Economic Growth.

PENDAHULUAN

Setiap negara yang sudah maju pasti diawali dengan adanya proses pertumbuhan, pertumbuhan ini secara jangka panjang akan menggambarkan pembnagunan tak terkecuali yakni pembangunan ekonomi, begitu pula pada negara-negara sedang berkembang atau biasa disebut dengan negara dunia ketiga. Pembangunan ekonomi merupakan suatu hal yang harus diwujudkan dan mendapatkan perhatian ekstra pada negara yang sedang

berkembang demi mencapai kesejahteraan bangsa dan menjadi bagian dari negara yang maju dalam bidang ekonomi maupun bidang lainnya.

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi yang dijalankan salah satu indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk melihat kenaikan dalam tingkat penerimaan perkapita. Wanggai (2012:153) berpendapat bahwa pertumbuhan dapat diukur secara

obyektif dengan melihat perluasan tenaga kerja, modal, volume perdagangan dan konsumsi selain itu pembangunan infrastuktur makin penting jika dilihat dari berbagai dimensi dan ekonomi yang tumbuh kuat memiliki relasi yang positif dengan kuantitas dan perbaikan kualitas infrastuktur.

Sejalan dengan presiden Republik Indonesia yang berharap bahwa pembangunan Indonesia berasal dari peranan daerah. Maka terlebih dahulu memerlukan penempatan alokasi dana daerah yang optimal bagi daerah-daerah di Indonesia. Indonesia yang sudah menjalankan desentralisasi fiskal sejak diberlakukannya otonomi daerah pada 1 Januari 2001 itu berharap aspek kemandirian pada daerah dalam bidang fiskal dapat menggali penerimaan daerah itu sendiri dan mengalokasikan dana secara optimal sebagai prioritas pembangunan daerah. Sebab kebijakan fiskal pada dasarnya merupakan alat atau instrumen pemerintah yang sangat penting peranannya dalam sistem perekonomian. Instrumen fiskal berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta memperluas lapangan usaha dalam berbagai sektor untuk mengurangi pengangguran. Selama ini banyak negara berkembang yang mencoba menerapkan desentralisasi fiskal dengan tujuan untuk mengatasi ketidakefektifan dan ketidakefisienan pemerintahan, ketidakstabilan makroekonomi, serta meningkatkan pertumbuhan ekonominya tak terkecuali Indonesia.

Desentralisasi fiskal yang diwujudkan di Indonesia bertumpu pada alokasi pusat ke daerah berupa dana perimbangan. Dana ini disalurkan pemerintah guna mengurangi ketimpangan antarprovinsi dan antarkabupaten/kota. Berikut adalah data dana perimbangan yang disalurkan

pemerintah pusat kepada provinsi/kabupaten/kota dari tahun 2010 sampai dengan 2014.

Tabel 1
Perkembangan Dana Perimbangan (miliar rupiah)

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| DAU | 203.571 | 225.533 | 273.814 | 311.139 | 349.229 |
| DAK | 20.956 | 24.803 | 25.941 | 30,752 | 33.000 |
| DBH | 92.183 | 96.909 | 111.537 | 88.463 | 117.663 |
| jumlah | 316.711 | 347.246 | 411.293 | 430.354 | 491.882 |

Sumber: data pokok apbn 2015, www.kemenkeu.go.id (data diolah penulis tahun 2016)

Kenaikan dana perimbangan tersebut tentunya untuk mendukung penyelenggaraan desentralisasi fiskal di Indonesia agar kewenangan daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada daerahnya semakin luas untuk menjamin pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan pembangunan ekonomi daerah. Data yang diperoleh dari Dirjen Perimbangan Keuangan, Jawa Timur adalah Provinsi yang mendapatkan dana perimbangan tertinggi dari 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp45.000.625.003.841 dengan presentase terbesarnya untuk Dana Alokasi Umum sebesar 50%. Sementara itu jika dilihat dari sisi Penerimaan lain yakni Penerimaan Asli Daerah (PAD), Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 memperoleh PAD sebesar 11,60 Triliyun tertinggi ke-3 setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Studi hasil penelitian mengenai hubungan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi masih menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda disetiap daerah. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia yang digambarkan melalui kewenangan

daerah mengatur pengeluaran dan pemberian penerimaan daerah melalui dana bantuan (*grants*), membuat peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana desentralisasi fiskal yang terjadi di kabupaten/kota Jawa Timur dan pengaruhnya bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

KAJIAN TEORITIK

Pertumbuhan ekonomi secara paling sederhana dapat diartikan sebagai penambahan output atau penambahan penerimaan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu, misalkan satu tahun. Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu (Prasetyo, 2009:237). Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan output perkapita. Dalam pengertian ini ada dua sisi yang diperhatikan yaitu output total dan jumlah penduduk, sebab apabila kedua aspek tersebut dijelaskan, maka perkembangan output perkapita bisa dijelaskan. Kemudian aspek yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi perspektif waktu jangka panjang, yaitu apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output perkapita menunjukkan kecenderungan yang jelas untuk menaik (Boediono, 2009:1-2). Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Angka yang digunakan untuk mengukur perubahan output adalah tercermin dalam nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atau dalam perekonomian daerah

disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB itu sendiri merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Indikator pertumbuhan ekonomi di Indonesia biasanya dilihat dari pendapatan nasional. Tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil tergambar dari kenaikan GDP/GNP berdasarkan harga konstan. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi tiap tahunnya dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara perubahan pendapatan nasional tahun yang dimaksud dikurangi pendapatan nasional tahun sebelumnya dibagi dengan pendapatan nasional pada tahun sebelumnya. Selain pendapatan nasional juga dilihat dari pendapatan perkapita yang dihitung dengan membagi pendapatan nasional terhadap jumlah penduduk.

Sementara itu menurut Saragih (2003:83) Desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Desentralisasi fiskal, merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Penerimaan Asli Daerah

(PAD) termasuk *surcharge of taxes*, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Pinjaman, maupun Subsidi/Bantuan dari Pemerintah Pusat.

Satu hal penting yang harus dipahami oleh semua pihak, bahwa desentralisasi fiskal adalah instrumen, bukan suatu tujuan. Desentralisasi fiskal adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola pembangunan guna mendorong perekonomian daerah maupun nasional. Melalui mekanisme hubungan keuangan yang lebih baik diharapkan akan tercipta kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, sehingga akan berimbas kepada kondisi perekonomian yang lebih baik. Desentralisasi fiskal di Indonesia adalah desentralisasi fiskal di sisi pengeluaran yang didanai terutama melalui transfer ke daerah. Dengan desain desentralisasi fiskal ini maka esensi otonomi pengelolaan fiskal daerah dititikberatkan pada diskresi (kebebasan) untuk membelanjakan dana sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan analisis regresi berganda (multiple regression) yang digunakan untuk memprediksi variasi variabel terikat dengan meregresikan lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersamaan. Analisis regresi berganda dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel bebas yaitu kapasitas pengeluaran dan kapasitas pendapatan terhadap variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi secara simultan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data panel

yaitu gabungan antara data *time series* (runtut waktu) dan data *cross section*. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yakni data pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 dan APBD kabupaten/kota (12 kabupaten dan 4 kota) Provinsi Jawa Timur periode tahun 2010-2014.

Tabel 2
Operasionalisasi Variabel Penelitian

| No. | Indikator | Uraian |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Desentralisasi Fiskal, Kapasitas Pengeluaran (X1) | $\frac{\text{Realisasi Pengeluaran kabupaten/kota}}{\text{Realisasi Pengeluaran provinsi} + \text{total pengeluaran kab/kota}}$ |
| 2. | Desentralisasi Fiskal, kapasitas pendapatan (X2) | $\frac{\text{PAD kabupaten/kota}}{\text{Total Pendapatan Daerah (TPD) Kab/kota}}$ |
| 3. | Pertumbuhan ekonomi | Perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota per tahun menurut harga konstan tahun 2010. |

Sumber: diolah penulis

Model regresi linier menggunakan data *cross section* dan *time series*. Mengingat dalam penelitian ini menggunakan data panel yaitu gabungan data *cross section* dan *time series* maka modelnya dituliskan dengan:

$$\text{PDRB}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{DF1}_{it} + \beta_2 \text{DF2}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

PDRB = Pertumbuhan PDRB

kabupaten/kota periode 2010-2014 (%)

α = Intercept / konstanta

β = Koefisien Regresi

DF1 = Rasio Penerimaan kab/kot terhadap penerimaan provinsi

DF2 = Rasio Pengeluaran kab/kot terhadap pengeluaran provinsi

ε = *Term of Error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tahapan dan perhitungan yang telah dilakukan selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 untuk mengetahui seberapa besar pengaruh desentralisasi fiskal yang dilihat dari kapasitas pengeluaran serta pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada 16 kab/kota di Jawa Timur. Peneliti menggunakan estimasi model *fixed effect* sebagai model terbaik dan persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3
Hasil Uji t

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 13.16726 | 0.041082 | 320.5081 | 0.0000 |
| EXPI | -0.033746 | 0.008869 | -3.805043 | 0.0003 |
| REVI | 0.013078 | 0.001021 | 12.81489 | 0.0000 |

Sumber: Data hasil olahan Eviews 8.0

Hasil persamaan regresi di atas memiliki konstanta sebesar 13.16 yang dapat diinterpretasikan bahwa ketika rasio kapasitas pengeluaran dan rasio kapasitas pendapatan daerah adalah konstan, maka pertumbuhan ekonomi 16 kab/kota di Jawa Timur sebesar 13.16 persen. Nilai koefisien EXPI atau indikator kapasitas pengeluaran yaitu -0.03 persen yang dapat diinterpretasikan bahwa apabila rasio kapasitas pengeluaran daerah naik sebesar 1% dengan asumsi variabel lainnya konstan, maka pertumbuhan ekonomi 16 kab/kota di Jawa Timur akan turun sebesar 0.03 persen. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang negatif antara rasio kapasitas pengeluaran daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada 16 kab/kota di Jawa Timur yang menjadi objek penelitian.

Nilai koefisien REVI atau rasio kapasitas pendapatan yaitu sebesar 0.01 yang dapat diinterpretasikan apabila rasio kapasitas pendapatan naik 1% dengan asumsi variabel bebas lain dianggap konstan, maka pertumbuhan ekonomi pada 16 kab/kota di Jawa Timur akan naik sebesar 0.01%. Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa adanya pengaruh positif antara rasio kapasitas pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada 16 kab/kota di Jawa Timur.

1. Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Variabel indikator kapasitas pengeluaran dan pendapatan memiliki nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.99 maka dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel bebas atau independen mampu menjelaskan keberagaman nilai variabel terikat yakni pertumbuhan ekonomi pada 16 kab/kota di Jawa Timur sebesar 99%. Dapat diartikan bahwa indikator kapasitas pengeluaran (X_1) dan kapasitas Pendapatan (X_2) memberikan sumbangan pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel pertumbuhan ekonomi pada 16 kab/kota di Jawa Timur sebesar 99%. Kekuatan pengaruh kapasitas pengeluaran dan pendapatan dapat dibilang lemah dan kurang dalam menjelaskan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan pengujian hipotesis uji F didapatkan hasil $F_{hitung} = 2047.992$ sedangkan $F_{tabel} = 3,12$, sehingga F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} dan dengan tingkat signifikansi seluruh variabel bebas berada pada 0,000 atau dibawah 0,05 (5 persen). Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas pengeluaran dan kapasitas pendapatan secara bersama-sama berpengaruh signifikan sesuai dengan

arahnya masing-masing terhadap pertumbuhan ekonomi 16 kab/kota pada di Jawa Timur pada kurun waktu 2010 hingga 2014.

Dengan adanya hasil tersebut, penelitian ini sejalan dengan penelitian Nobuo Akai & Masayo Sakata, Puji Wibowo, serta Freddy Situngkir dkk dimana penelitian mereka sama-sama menyimpulkan bahwa Desentralisasi Fiskal yang diukur melalui Indikator pengeluaran dan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik yang bernilai positif maupun negatif.

Dari hasil penelitian ini sejalan dengan teori Oates yang menyatakan desentralisasi fiskal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena pemerintah daerah mampu menyeleksi kebutuhan daerahnya sendiri. Namun dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa hal yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu dari sisi pengukuran desentralisasi yang berbeda. Hal ini menunjukkan tidak semua negara atau daerah menunjukkan pengaruh yang positif atas adanya desentralisasi fiskal dan pengukuran yang belum tepat atau berbeda-beda

2. Indikator Kapasitas Pengeluaran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil perhitungan t_{hitung} pada rasio kapasitas pengeluaran ($EXPI$) sebesar -3.80 dan $t_{tabel}(-1.66)$ apabila diambil nilai mutlaknya maka didapatkan bahwa t_{hitung} sebesar 3.80 dan t_{tabel} sebesar 1.66. dikarenakan $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka indikator kapasitas pengeluaran secara parsial memiliki pengaruh dengan arah hubungan negatif pada pertumbuhan ekonomi 16 kab/kota di Jawa Timur yang menjadi objek penelitian.

Berdasarkan perhitungan diatas hal ini tidak sejalan dengan penelitian

Nobuo Akai, Masayo Sakata, Puji Wibowo yang menyatakan indikator pengeluaran berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda yakni indikator pengeluaran menunjukkan pengaruh yang negatif bagi pertumbuhan ekonomi di 16 kab/kota pada Jawa Timur. Pada penelitian Freddy Situngkir dkk mengenai Desentralisasi Fiskal sisi pengeluaran menemukan pengaruh negatif signifikan di Sumatra Utara, sama halnya dengan penelitian ini. Meningkatnya rasio pengeluaran atau belanja daerah akan memberikan pengaruh yang negatif pada 16 kab/kota di Jawa Timur yang menjadi objek penelitian.

Desentralisasi fiskal di Indonesia menitik beratkan pada sisi pengeluaran dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya dalam hal membelanjakan APBD nya sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Oleh karena itu pengaruh belanja daerah terhadap perekonomian daerah akan sangat tergantung pada alokasi dan komposisi belanja atau pengeluaran daerah. Selama ini kualitas belanja daerah dalam APBD memang dinilai masih lemah karena belanja tidak langsung selalu lebih besar dari belanja langsung. Belanja langsung menurut literatur merupakan belanja yang mempunyai pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dalam mengungkit dan menggerakkan roda perekonomian. Pada 16 kab/kota yang menjadi objek penelitian ini peneliti melihat hal yang sama, yakni proporsi belanja pegawai yang merupakan belanja tidak langsung masih jauh lebih besar dibanding belanja modal atau belanja langsung. Menurut penelitian lainnya yakni Faisal salah satu faktor desentralisasi dari sisi

pengeluaran itu negatif adalah kurangnya peningkatan *skill* para aparatur pemerintahan daerah dan akuntabilitas politik yang lebih baik, serta penggunaan dana oleh pemerintah daerah yang tidak bertanggung jawab. Berikut adalah proporsi belanja pegawai dan belanja modal total 16 kabupaten/kota di Jawa Timur yang menjadi objek penelitian.

Tabel 4
Total Belanja Pegawai dan Modal
16kab/kota di Jawa Timur

| Tahun | Belanja Pegawai | Belanja Modal |
|-------|-----------------|---------------|
| 2010 | 8.691.455 | 1.984.213 |
| 2011 | 9.875.051 | 2.467.467 |
| 2012 | 11.326.935 | 3.418.886 |
| 2013 | 12.334.915 | 3.768.422 |
| 2014 | 13.520.025 | 4.848.407 |

Sumber: DJPK, diolah penulis

tahun 2016.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa proporsi belanja modal lebih kecil dari belanja pegawai, sehingga hal ini dapat memperlambat pembangunan daerah yang berasal dari pengeluaran untuk belanja modal. Belanja modal itu sendiri terdiri dari, tanah, peralatan & mesin, gedung & bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan asaset lainnya. Efek negatif yang ditimbulkan desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran ini juga dapat dijelaskan dalam penelitian Puji Wibowo karena kompetensi dan kapasitas pemimpin daerah yang kurang dapat mengakomodir preferensi dan kebutuhan masyarakat sehingga porsi pengeluaran atau belanja daerah menjadi tidak tepat sasaran.

3. Indikator Kapasitas Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil perhitungan t_{hitung} pada rasio kapasitas pendapatan ($REVi$) sebesar 12.81 dan t_{tabel} 1.66. Dikarenakan $t_{hitung} >$

t_{tabel} maka indikator kapasitas pendapatan secara parsial memiliki pengaruh pada pertumbuhan ekonomi 16 kab/kota di Jawa Timur yang menjadi objek penelitian. Indikator pendapatan yang diukur melalui rasio antara Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) secara statistik juga dinyatakan signifikan karena probabilitasnya < 0.05 . Menurut literatur rasio antara PAD dan TPD ini juga dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui derajat desentralisasi fiskal dalam hal kemandirian daerah.

Hasil positif dan signifikan ini bertolak belakang dengan penelitian pada jurnal Freddy Situngkir dkk yang memperoleh hasil negatif pada pengukuran melalui rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD). Sementara itu pada penelitian Puji Wibowo rasio PAD terhadap TPD yang pada sebelum tahun 2001 memiliki pengaruh negatif berubah menjadi positif setelah tahun 2001 dimana pelaksanaan otonomi fiskal dilaksanakan. Indikator penerimaan ini juga dapat mencerminkan kemandirian daerah atau dalam literatur rasio PAD terhadap TPD menggambarkan derajat desentralisasi fiskal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi pada 16 kabupaten/kota di Jawa Timur periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 menggunakan analisis data panel, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu, Hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dari indikator pengeluaran yang diukur melalui rasio pengeluaran kab/kota terhadap total

pengeluaran seluruh kab/kot ditambah provinsi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Namun setelah dilakukan perhitungan statistik ternyata indikator dari sisi pengeluaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada 16 kab/kota di Jawa Timur yang menjadi objek penelitian periode 2010-2014. Hal ini berarti apabila rasio pengeluaran daerah meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan. Penyebab desentralisasi fiskal dalam beberapa hal menjadi kurang menguntungkan bagi pertumbuhan antara lain karena komposisi pengeluaran pemerintah yang kurang tepat hal ini dapat dilihat dari besarnya jumlah belanja tidak langsung daripada belanja langsung seperti belanja modal pada 16 kab/kota di Jawa Timur yang menjadi objek penelitian. Hipotesis yang menyatakan desentralisasi fiskal pada indikator pendapatan yang diukur melalui rasio PAD terhadap TPD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dapat diterima dan signifikan secara statistik. Hal ini berarti kenaikan rasio PAD terhadap TPD dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi pada 16 kabupaten/kota di Jawa Timur yang menjadi objek penelitian periode 2010 sampai 2014.

Adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu, pemerintah daerah hendaknya dapat menciptakan efisiensi anggaran dengan melihat langsung kebutuhan apa yang ada di setiap kabupaten/kota. Pada alokasi anggaran belanja langsung hendaknya lebih banyak digunakan pada pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan penghubung atau transportasi, pembangkit listrik, dan telekomunikasi agar tercipta

kabupaten/kota yang saling terintegrasi. Kemudian, Kewenangan pemerintah daerah untuk menggali sumber pendapatannya sendiri harus terus dimanfaatkan serta ditingkatkan, karena hal tersebut mewujudkan kemandirian daerah yang tidak bergantung pada dana perimbangan dari pusat agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya, Pemerintah daerah hendaknya terus melaksanakan pelatihan-pelatihan serta pengawasan pada pegawai pengelola keuangan agar tercipta pengelolaan keuangan daerah yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bahl, Roy. 2008. *CAF working papers "The Pillars of Fiscal Decentralization"*.
- Bayu Kharisma. *Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebelum dan sesudah Era Desentralisasi Fiskal di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Oktober 2013, Vol. 14, No. 2, hal. 101-119
- Boediono. 2009. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFU UGM.
- Deky Aji Suseno. *Efektivitas dan kemandirian keuangan daerah provinsi Jawa tengah pasca diterapkannya desentralisasi fiskal*, Economic Development Analysis Journal. Mei 2013.
- Freddy Situngkir, dkk. *Pengaruh Desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara*, Jurnal Ekonomi. Juli 2014, Vol.17, No. 3, hal. 125-137

- Gujarati, Damodar N. 1999. *Ekonometrika Dasar*. Terjemahan Sumarno Zain. Jakarta: Erlangga.
- Hadi Sasana. *Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*, Jurnal Ekonomi Pembangunan. Juni 2009, Vol.10, hal. 103-124
- Jhingan, M.L. 2003. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Penerjemah D. Guritno. Edisi 9. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jumadi, dkk. *The Impact of Fiscal Decentralization on Local Economic Development in East Jawa*, IOSR Journal Of Humanities And Social Science.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori&Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Grasindo.
- Nobuo Akai dan Masayo Sakata. *Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence From State-level Cross-Section Data for the United States*, Journal Of Urban Economics. March 2002, 52, hal. 93-108.
- Prasetyo, Eko P. 2009. *Fundamental Makro Ekonomi*. Yogyakarta: Beta Offset.
- Pratomo, Aryo. 2007. *Wahyu dan Paidi Hidayat. Pedoman Praktis Penggunaan Eviews dalam ekonometrika*. Cetakan pertama. Medan: Usu Press.
- Priyo Hadi. 2005. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Jurnal Interdisipliner Kritis UKSW.
- Puji Wibowo. *Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah*, Jurnal Keuangan Publik. Oktober 2008, Vol.5, hal. 55-83
- Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi daerah dan Desentralisasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Saragih, J.P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sidik, Machfud. 2002. "Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal". Kertas kerja pada Seminar Nasional Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi daerah di Indonesia, Yogyakarta.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Supriatna, Tjahya. 1996. *Sistem Administrasi Pemeintahan di Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wanggai, V.V. 2012. *Pembangunan untuk semua*. Jakarta: PT Indomultimedia communications grup.
- Winarno, Wing Wahyu. 2015. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Website:

- www.bps.go.id
www.djpk.kemenkeu.go.id
m.kompasiana.com/percepatan-pembangunan-dengan-desentralisasi-fiskal.html
m.merdeka.com/uang/darmin-kita-perlu-pertumbuhan-ekonomi-di-atas-6-persen.html
www.simreg.bappenas.go.id